Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2020, 11(1), 138-158

Jurnal Akuntansi Multiparadigma

www.jamal.ub.ac.id

Jurusan Akuntansi Masyarakat Akuntansi Multiparadigma Indonesia

POLITIK PENAMAAN DI DALAM PELAPORAN KORPORAT PASCAIMPLEMENTASI *INTEGRATED REPORTING*

Nina Febriana Dosinta, Handi Brata

Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak 78124

Surel: nina.febriana.d@ekonomi.untan.ac.id

Volume 11
Nomor 1
Halaman 138-158
Malang, April 2020
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
01 Maret 2020
Tanggal Revisi:
07 April 2020
Tanggal Diterima:
30 April 2020

Kata kunci:

integrated reporting,
korporat,
pelaporan,
perubahan semu

Abstrak: Politik Penamaan di Dalam Pelaporan Korporat Pascaimplementasi *Integrated Reporting*. Penelitian ini bertujuan mengkaji perubahan dan menggali unsur politik pada pelaporan korporat di Indonesia pascaterlaksananya *integrated reporting*. Penelitian ini menerapkan metode analisis konten kritis pada *integrated reporting*, *annual report*, dan *sustainability reporting* pada beberapa perusahaan tahun 2009-2018. Hasil penelitian menunjukkan terjadi perubahan pelaporan korporat yang bersifat semu. Walau perusahaan telah berhasil dalam menerapkan *integrated reporting* dengan kurun waktu 4-7 tahun, tidak menjamin bahwa pengadopsiannya dapat dilakukan secara kontinu. Oleh karena itu, pemegang saham selaku 'penguasa tertentu' selayaknya menekan perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan di masa depan.

Abstract: Politics of Naming in Corporate Reporting After Integrated Reporting Implementation. *This study aims to examine changes and explore the political elements in corporate reporting in Indonesia after the implementation of integrated reporting. This study applies a critical content analysis method in integrated reporting, annual report, and sustainability reporting in several companies in 2009-2018. The results show a pseudo change in corporate reporting. Although all companies have succeeded in implementing integrated reporting with a span of 4-7 years, it does not guarantee that the adoption can be carried out continuously. Therefore, shareholders as 'certain authorities' should pressure the company to maintain the company's sustainability in the future.*

CC BY NC

Mengutip ini sebagai: Dosinta, N. F., & Brata, H. (2020). Politik Penamaan di Dalam Korporat Pascaimplementasi Integrated Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11*(1), 138-158. https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.1.09

> "*When the words are played … It's a 'politics of naming' … It's a game …* [*and*] *… The winners* [*are*] [*t*]*he powerful*" (Irianto & Gaffikin, 2006).

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks, IR menawarkan pelaporan korporat yang holistik dan diharapkan dapat mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik, agar dapat memenuhi kebutuhan informasi dalam satu pelaporan untuk pemegang saham (Higgins et al., 2019; Massingham et al., 2019) serta untuk pemangku kepentingan (Wulf et al., 2014). Adopsi IR diprediksi dapat memainkan peranan penting dalam menghasilkan pelaporan korporat, khususnya yang berkenaan dengan strategi perusahaan, model bisnis, materialitas, dan *value creation* (Reverte, 2015). Akan tetapi, sekelompok peneliti menemukan bahwa pada *value creation* sebagai esensi dalam IR dapat diungkapkan dalam AR dan SR, tidak harus dalam IR. Metodologi '*true value*' dalam IR yang disodorkan oleh KPMG (2014) bukanlah 'barang baru' bagi perusahaan (Barter, 2016; Coulson, 2016; Dosinta et al., 2018).

Ibarat *old wine in the new bottle*, nilai yang sudah tertanam dalam perusahaan kemudian dibingkai dalam bahasa lain yang mudah dipahami. Hal tersebut tentu saja menggelitik pemikiran bahwa apakah '*true value*' tersebut hanyalah kata-kata yang tersusun rapi dalam implementasi IR akibat adanya tekanan pihak eksternal ataukah terdapat tekanan lainnya.

IR juga dipercaya sebagai wujud pelaporan korporat yang berkualitas tinggi. Kualitas pelaporan IR yang tinggi berpotensi menarik investor asing dan mendukung aliran modal ke dalam suatu negara, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial. Implikasinya, beberapa perusahaan di negara Kolombia menggunakan *International Integrated Reporting Framework* (IIRF) dengan tujuan untuk mendukung ekspansi perusahaan, serta meningkatkan reputasi dan legitimasi (Macias & Farfan-Lievano, 2017). Selain itu, negara-negara, seperti Brazil, Mexico (Steenkamp, 2018), dan Afrika Selatan (Bananuka et al., 2019), telah menetapkan IR sebagai *mandatory* dalam pelaporan korporat. Di negara Afrika Selatan khususnya, penelitian-penelitian terdahulu menemukan paling tidak tiga motif yang mendasari perusahaan mengadopsi IR. Motif utama berupa kecenderungan perusahaan untuk meningkatkan reputasi dan legitimasi daripada akuntabilitas perusahaan (Steyn, 2014), sedangkan motif yang kedua lebih bersifat seremonial yang bertujuan untuk memperoleh legitimasi (Haji & Anifowose, 2017), serta motif yang terakhir bersifat simbolis (Setia et al., 2015; Veltri & Silvestri, 2015). Meskipun demikian, antusiasme negara-negara seperti di Benua Afrika dan Amerika Latin tersebut masih kurang berdampak dalam mendorong perusahaan-perusahaan di Benua Asia untuk mengadopsi IR (Dumay et al., 2017). Hasil survei yang dilakukan oleh Adhariani & Villiers (2019) menunjukkan bahwa 48% dari total responden mendukung adopsi IR di negara-negara di dunia, termasuk negara Indonesia, dan menjadikannya *mandatory*. Akan tetapi, hasil penelitian dari Adams (2015) menyarankan agar status IR tetaplah bersifat *voluntary*, mengingat kurang berkembangnya bidang akuntansi pada pelaporan dalam bentuk IR.

Hasil evaluasi IR pada pelaporan korporat di negara Australia, yang dilakukan oleh Liu et al. (2019), masih menemukan adanya ketidaksesuaian pengungkapan korporat dengan tolok ukur yang digunakan. Hal tersebut mencerminkan '*gap*' antara IR yang diinginkan dalam IIRF dan *Global Reporting Initiative* (GRI) dengan praktik sebenarnya (Robertson & Samy, 2015; Stent & Dowler, 2015; Stubbs & Higgins, 2014). Pada sisi lainnya, Slack & Tsalavoutas (2018) memaparkan bahwa pelaporan dalam bentuk IR ternyata belum mampu menawarkan keunggulan yang sama seperti yang diberikan oleh SR, di mana penekanan IR lebih pada pemegang saham, bukan pada pemangku kepentingan sehingga IR dianggap tidak memadai untuk mendorong keberlanjutan. Hal ini senada yang dipaparkan Flower (2015) dan Thomson (2015) justru mempertanyakan *International Integrated Reporting Council* (IIRC) selaku pihak yang memprakarsai IR tidak memberikan penekanan khusus pada keberlanjutan, bahkan berspekulasi bahwa kemungkinan SR akan menempatkan beban yang terlalu besar pada perusahaan. Argumen tersebut tentu menegaskan bahwa IR belum mengungkapkan kontribusi suatu organisasi terhadap transformasi keberlanjutan serta belum terlihat konektivitas dan konsekuensi dari tindakan entitas pada sistem sosial, ekonomi dan ekologi. Tidak mengherankan, Kannenberg & Schreck (2019) memaparkan bahwa dalam IR menyimpan keraguan menjadi 'kutukan' atau 'anugerah' bagi kemajuan keberlanjutan perusahaan.

Memasuki dasawarsa kedua implementasi IR, pelaporan korporat mengalami kejenuhan dalam menyampaikan informasi-informasi penting operasi perusahaan berbasis IR. Hal ini memicu perdebatan, bahwa apakah IR sudah kehilangan momentumnya dalam ajang pelaporan korporat ataukah terdapat pertimbangan yang lain. Namun, penjelasan ilmiah dan penelitian yang menitikberatkan topik diskusi ini masih dirasa kurang sehingga pemahaman mengenai arah perubahan pelaporan korporat di Indonesia masih terasa minim. Di satu sisi, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian tentang IR, AR, dan SR sangat banyak dipublikasikan selama ini. Namun, hasil penelitian lebih banyak dipengaruhi oleh pendapat dari kelompok pendukung IR, di antaranya Conway (2019), Cortesi & Vena (2019), Menicucci (2018), dan Tlili et al. (2019). Sedangkan kelompok pengritik IR di antaranya Adams (2015), Dosinta et al. (2018), Flower (2015), dan Thomson (2015). Oleh karena itu, timbul 'pengotakan' pemikiran. Di sisi

Tabel 1. Data Pelaporan Korporat

Perusahaan	IR	AR	SR	Total
PT Timah	7	3	3	13
PT Pertamina EP	5	5	2	12
PT Elnusa	4	6	2	12
Total	**16**	**14**	**7**	**37**

lain, praktik pelaporan korporat di Indonesia mengalami fenomena anomali yang menyisakan pertanyaan berkenaan IR selaku pelaporan korporat yang mungkin terjadi perubahan semu. Kondisi ini jelas lebih menarik untuk dikaji mengingat penelitian sebelumnya belum mengkaji fenomena anomali pelaporan korporat. Sementara itu, penelitian terdahulu telah mengevaluasi dan memberikan pembahasan tentang implementasi IR dari berbagai sudut pandang teoritik, seperti dari sudut pandang teori legitimasi, terdapat penelitian oleh Beck et al. (2015), Bommel (2014), Setia et al. (2015), dan Villiers et al. (2014), yang kemudian dilanjutkan oleh Haji & Anifowose (2016), dari teori *stakeholder* oleh Wulf et al. (2014), dan teori institusional oleh Adams et al. (2016), Chariri (2019), dan Fuhrmann (2019). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji secara khusus perubahan pelaporan korporat yang sebelumnya mengadopsi IR.

Berpijak pada rerangka konsep institusional, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan pelaporan korporat yang sebelumnya telah berhasil melaporkan dalam bentuk IR dan mengkaji lebih lanjut AR dan SR perusahaan-perusahaan tersebut setelah tidak lagi menerapkan IR. Maka, penelitian ini berfokus pada perusahaan di Indonesia yang sebelumnya telah berhasil menerapkan IR, tetapi memilih untuk tidak lagi menerapkan IR, seperti PT Timah, PT Pertamina EP, dan PT Elnusa. Singkatnya, perusahaan-perusahaan tersebut mengalami anomali pelaporan korporat. Analisis penelitian ini juga berusaha untuk mencari jawaban untuk pertanyaan mengapa PT Timah dan PT Elnusa yang telah mencapai keberhasilan dalam menerapkan IR dengan berpedoman salah satunya pada GRI, sedangkan PT Pertamina EP dengan berpedoman salah satunya pada IIRF dan GRI, kemudian ketiga perusahaan memilih untuk ke AR dan SR yang berpedoman salah satunya dengan GRI. Oleh karena itu, kajian penelitian ini penting dilakukan mengingat tinggal segelintir perusahaan di Indonesia yang masih menerapkan IR serta sampai kapan perusahaan tersebut akan bertahan. Penelitian ini berkontribusi secara akademis dalam memberikan gambaran mengenai wajah perubahan pelaporan korporat di Indonesia yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya dan menjadi fondasi teoritis dalam rangka evaluasi implementasi IR di Indonesia. Sementara itu, dari segi praktis, penelitian ini memberikan gambaran wujud perubahan pelaporan korporat beserta substansinya kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan serta memberikan masukan kepada perusahaan yang berkeinginan untuk mentransformasi pelaporan korporatnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis konten berdasarkan kodifikasi yang dikembangkan oleh Liu et al. (2019) dan didukung kajian secara kritis. Relevansi ilmiah penelitian penggunaan analisis konten sebagai metode dalam pemeriksaan pelaporan korporat terletak pada prosedur pengumpulan, analisis, dan penafsiran data (Liao et al., 2017; Trilling & Jonkman, 2018) dengan didominasi oleh aspek keberlanjutan yang ditunjukkan dalam pelaporan perusahaan (Owen, 2013). Untuk mendukung analisis konten, kajian perubahan pelaporan korporat dilakukan secara kritis. Hal tersebut memiliki keunggulan, seperti mampu memaknai nilai-nilai yang didasari oleh sarat berbagai kepentingan sehingga menampilkan keunikan (Efferin, 2015; Modell, 2015; Sriwenarti & Triyuwono, 2010), mampu mengakomodasi cara pandang yang berbeda, melalui lensa objektivitas dan subjektivitas (Djamhuri, 2011; Sudarma, 2010), berjuang untuk menyampiakan temuan secara lebih menyeluruh, serta menghindari pola pemikiran yang terlalu "deterministik dan reduksionistik" (Mulawarman, 2010; Setiawan, 2011), dan akan berkontribusi dengan penekanan pada penjelasan kritis (Modell, 2017). Selain itu, dalam kajian kritis, peneliti

Tabel 2. *Checklist* dalam Kategori Pengungkapan

Kategori Pengungkapan	Uraian Kategori Pengungkapan
Capitals	*Capitals* mewakili *stock of value* yang digunakan sebagai input oleh organisasi dan juga *stock of value* yang dikeluarkan oleh organisasi melalui model bisnis.
Elemen Konten	Elemen konten menyajikan panduan untuk informasi yang termasuk dalam IR dan terhubung satu dengan yang lainnya.
Prinsip Pedoman	Prinsip pedoman diperkenalkan IIRC yang termasuk dalam IIRF guna mendukung praktik IR dalam organisasi secara keseluruhan.
Tingkat Materialitas	Materialitas mengacu pada hal-hal yang memiliki efek aktual guna menghasilkan *value creation* pada organisasi dalam jangka pendek, menengah, dan panjang.

Sumber : Liu et al. (2019)

perlu membongkar pelaporan korporat yang sudah diterapkan, menggali pemahaman yang terselubung dalam tampilan wajah pelaporan korporat dengan teori yang relevan, kemudian memperhatikan proses terjadinya perubahan pelaporan korporat secara saksama. Selanjutnya peneliti mencermati pola keterkaitannya dan akhirnya mempertimbangkan pencapaian masa lalu untuk memprediksi segala kemungkinan perubahan pelaporan korporat di masa yang akan datang, sehingga dapat menyelenggarakan perubahan pada pelaporan korporat yang lebih baik (Witono, 2016).

Analisis konten dalam penelitian ini menggunakan informasi yang diungkapkan dalam pelaporan korporat. Data yang digunakan berasal dari pelaporan korporat perusahaan, meliputi IR, AR, dan SR selama periode pengamatan 2009-2018. Penelitian ini memilih PT Timah, PT Pertamina EP, dan PT Elnusa dengan pertimbangan ketiga perusahaan ini menaruh perhatian pada IR minimal selama 3 tahun berturut-turut yang terungkap melalui pernyataan ke publik di laman resmi masing-masing perusahaan. Pertimbangan lainnya berupa ketiga perusahaan pada tahun 2018 beralih menerapkan AR dan SR, tidak lagi menerapkan IR. Analisis data dalam penelitian ini berjumlah tiga puluh tujuh data yang disajikan pada Tabel 1. Paragraf yang menyajikan informasi berkenaan dengan kodifikasi yang dilakukan merupakan unit analisis dalam penelitian ini (Liu et al., 2019). Keunggulan pengukuran unit analisis menggunakan paragraf terletak pada pemaknaan, karena simpulan yang ditarik dari pernyataan naratif lebih tepat digunakan daripada hanya berasal dari sejumlah kata-kata (Davis & Bisman, 2015).

Metode analisis konten dalam penelitian ini melewati tiga tahapan. Pertama, penelusuran paragraf dengan tujuan untuk pengidentifikasian berdasarkan kodifikasi yang dikembangkan dari penelitian Liu et al. (2019). Kodifikasi tersebut disajikan pada Tabel 2, lebih unggul karena kategori pengungkapan mengoperasionalkan IIRF yang disesuaikan dengan GRI sehingga pedoman GRI yang ada tidak hanya terbatas pada pengungkapan indikator informasi lingkungan dan sosial, tetapi juga diperluas ke tata kelola organisasi dan keberlanjutan. Kedua, untuk memastikan adanya perubahan semu dalam pelaporan korporat, penelitian ini melakukan analisis terhadap cakupan pelaporan yang terdapat dalam AR dan SR yang selaras dengan IIRF dan GRI. Elemen konten untuk analisis cakupan disajikan pada Tabel 3. Ketiga, untuk mendapatkan simpulan teori dari data, analisis konten berdasarkan kodifikasi dilakukan secara berulang-ulang (Covaleski et al., 2013) sebagaimana yang disarankan oleh Elliot (2016).

Dalam proses penjaringan data langkah pertama adalah identifikasi unit analisis yang berupa paragraf berkenaan dengan capitals, elemen konten, prinsip pedoman, dan materialitas yang terdapat dalam IR, AR dan SR. Langkah berikutnya berupa pemaknaan paragraf tersebut. Untuk memastikan tingkat reliabilitas dan validitas temuan yang memadai, kedua peneliti menginvestigasi beberapa permasalahan penelitian dalam waktu yang sama (Anney, 2014) guna mencapai kesamaan atas jawaban dari permasalahan penelitian. Upaya *investigator triangulation,* yang meliputi kesamaan hasil kodifikasi dalam waktu yang sama (Karlsson & Sjøvaag, 2016) juga diterapkan dengan melibatkan

Tabel 3. Elemen Konten dan Prinsip Pedoman IR serta Pedoman GRI G4

IR Framework – Content Elements	*G4 Guidelines*
Strategi Model Bisnis dan Alokasi Sumber	Strategi dan analisis
Overview Organisasi dan Lingkungan Eksternal	Profil Organisasi
Risiko dan Kesempatan	Identifikasi Aspek dan Batasan Material
Hubungan Pemangku Kepentingan (Prinsip)	Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Dasar Persiapan dan Penyajian	Profil Laporan
Tata Kelola Perusahaan	Etika dan Integritas
Outlook Kinerja	Manajemen dan Kinerja sehubungan dengan Aspek Material
IR Framework – Guiding Principles	
Fokus Strategi dan Orientasi Masa Depan	Konteks Keberlanjutan
Materialitas dan Ringkasan	Materialitas
Kelengkapan	Kelengkapan
Hubungan Pemangku Kepentingan	Inklusivitas Pemangku Kepentingan
Reliabilitas	Reliabilitas, Ketepatan Waktu, Akurasi, dan Seimbang
Dapat Dibandingkan dan Konsistensi	Dapat Dibandingkan dan Kejelasan
Konektivitas Informasi	

Sumber : Diadaptasi KPMG (2014)

analis independen agar didapatkan konsistensi hasil analisis yang lebih tinggi serta meminimalkan subjektivitas. Walaupun keberadaan analis independen untuk memaksimalkan objektifitas penelitian, jika terjadi perbedaan, kedua peneliti bersama analisis independen melakukan diskusi untuk menentukan hasil pemaknaan secara tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perjalanan IR pada PT Timah, PT Pertamina EP, dan PT Elnusa. Praktik *voluntary disclosure* IR telah mendapatkan momentum sejak pembentukan IIRC pada tahun 2010 oleh dua organisasi pemerhati pelaporan keberlanjutan yaitu Proyek *Prince's Accounting for Sustainability* (A4S) dan GRI (Feng et al., 2017; Villiers et al., 2014) serta momentum tersebut juga terasa sampai di Indonesia. Hal tersebut terlihat jelas pada upaya PT Timah yang mulai penerapan IR pada tahun 2010, tatkala pola pelaporan pada tahun 2009 masih berbentuk AR dan SR, dapat dilihat pada Tabel 4. Berbeda dengan PT Timah, PT Pertamina EP baru mulai menyajikan IR yang berdasarkan pedoman BAPEPEM, GRI G3 ke publik pada tahun 2012 dan secara bertahap, mengadopsi pedoman POJK, serta GRI G4 dan IIRF pada tahun 2014. Begitu juga dengan PT Elnusa, perusahaan ini menyajikan laporan berbasis IR pada tahun 2014 dengan menggunakan pedoman POJK, GRI G4. Sayangnya, pada tahun 2017 ketiga perusahaan ini menunjukkan kecenderungannya untuk meninggalkan IR dan beralih sepenuhnya ke penyajian laporan berbasis AR dan SR pada tahun 2018.

Kondisi anomali pelaporan demikian tentu saja menimbulkan pertanyaan mengenai keseriusan perusahaan pada awal pengadopsian IR. Sebagai tahap awal penelitian melalui penelusuran paragraf, terlihat dari hasil kodifikasi dari elemen konten, tepatnya pada dasar penyajian dan persiapan, disebutkan bahwa dalam penyusunan IR ketiga perusahaan menunjukkan upaya yang serius dalam melibatkan pemangku kepentingan. Sebagai contoh, PT Timah mengungkapkan bahwa:

> "…dalam menyusun laporan terintegrasi ini, Perseroan mengikutsertakan pemangku kepentingan untuk mendapatkan hasil yang lebih menyeluruh. Dengan melibatkan pemangku kepentingan, Perseroan bisa mendapatkan kritik dan masukan yang konstruktif untuk perbaikan kinerja di waktu-waktu mendatang. Selain itu, PT TIMAH (Persero) Tbk juga memiliki kesempatan untuk me-

Tabel 4. Matriks Pelaporan Korporat PT Timah, PT Pertamina EP, dan PT Elnusa

Tahun	PT Timah	PT Pertamina EP	PT Elnusa	Total
2009	AR BAPEPAM SR GRI G3	AR BAPEPAM	AR BAPEPAM	4
2010	IR BAPEPAM, GRI G3	AR BAPEPAM	AR BAPEPAM	3
2011	IR BAPEPAM, GRI G3	AR BAPEPAM	AR BAPEPAM	3
2012	IR BAPEPAM, GRI G3	IR BAPEPAM, GRI G3	AR BAPEPAM	3
2013	IR BAPEPAM, GRI G4	IR BAPEPAM, GRI G4	AR BAPEPAM	3
2014	IR POJK, GRI G4	IR POJK, GRI G4, IIRF	IR POJK, GRI G4	3
2015	IR POJK, GRI G4	IR POJK, GRI G4, IIRF	IR POJK, GRI G4	3
2016	IR POJK, GRI G4	IR POJK, GRI G4, IIRF	IR POJK, GRI G4	3
2017	AR POJK, ARA SR GRI G4	AR ARA SR GRI G4	IR POJK, GRI G4 SR POJK, GRI G4	6
2018	AR POJK, ARA SR GRI G4	AR ARA SR GRI G4	AR POJK, ARA SR POJK, GRI G4	6
Total	**13**	**12**	**12**	**37**

> ngetahui harapan para pemangku kepentingan kepada Perseroan. Oleh karena besarnya manfaat yang dipetik, keterlibatan dan komunikasi dua arah antara Perseroan dan pemangku kepentingan ini akan dilakukan dan menjadi model penyusunan laporan berikutnya" (PT Timah, 2016: 61).

Berdasarkan hasil penelusuran kodifikasi dari elemen konten, khususnya pada dasar penyajian dan persiapan, terlihat keseriusan PT Pertamina EP dan PT Elnusa dalam mengadopsi IR. Hal ini juga terlihat pada Laporan IR perusahaan pada tahun 2016 dengan menunjukkan langkah-langkah yang telah ditempuh perusahaan selama ini.

> "Laporan Tahunan Terintegrasi sebelumnya telah kami sampaikan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan" (PT Elnusa, 2016: 5).

> "Penetapan isi laporan didasarkan pada prinsip pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholders inclusiveness*)... (*yang*) sesuai (*dengan*) pedoman penulisan laporan keberlanjutan GRI G4. Hasil FGD dilaporkan kepada Sekretaris Perusahaan selaku pejabat senior Perusahaan guna mendapatkan persetujuan atas informasi kinerja keberlanjutan yang disampaikan dalam Laporan" (PT Pertamina EP, 2016: 65).

Untuk menjamin kontinuitas pelaporan IR, Dumay & Dai (2017) menegaskan bahwa perusahaan perlu menyatukan informasi berbasis nonkeuangan untuk melengkapi data keuangan dalam pelaporan korporatnya yang disertai dengan perubahan struktural dan budaya pelaporan dalam pengambilan keputusan. Namun, pelaporan ketiga perusahaan dalam kurun waktu 4-7 tahun, terhitung sejak tahun pertama adopsi IR, memperlihatkan bahwa tidak terdapat upaya untuk menyatukan kedua informasi yaitu data keuangan dan informasi nonkeuangan dalam pelaporannya, baik yang berbasis IR maupun yang telah beralih ke AR dan SR. Tentu saja hal tersebut menggelitik pemikiran, apakah hal tersebut merupakan cerminan perubahaan struktural dan budaya pelaporan yang tidak berhasil, ataukah terdapat alasan mendasar lainnya di balik semua peristiwa dalam perubahan pelaporan korporat.

Beranjak dari IR ke AR dan SR. Setiap perubahan dalam organisasi biasanya bermuara pada pengembangan pelaporan korporat yang baru. Lewat interaksi dengan para pemangku kepentingan, perusahaan mendapatkan input untuk pola pelaporan yang diharapkan dan pada saat itu pula, perusahaan mendapatkan legitimasi un-

Tabel 5. Pengungkapan Kinerja Perusahaan dalam Konteks Keberlanjutan

Pengungkapan	PT Timah	PT Pertamina EP	PT Elnusa
Diungkapkan dalam IR Tahun 2016	"Data dan informasi yang disajikan dalam laporan ini, seperti telah disampaikan sebelumnya berkaitan dengan tidak hanya Perseroan saja tetapi juga termasuk entitas anak Perusahaan dan pihak lain yang teridentifikasi signifikan mempengaruhi kinerja keberlanjutan Perseroan yaitu pemasok dan distributor" (PT Timah, 2016: 67).	"Sebagai laporan yang terintegrasi, laporan ini memadukan laporan keuangan dengan kinerja keberlanjutan Perusahaan" (PT Pertamina EP, 2016: 62).	"Informasi yang tersaji pada Laporan Tahunan terintegrasi ini antara lain meliputi laporan kegiatan perusahaan, laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan laporan keberlanjutan yang memuat kinerja Perseroan dalam konteks keberlanjutan" (PT Elnusa, 2016: 4).
Diungkapkan dalam SR Tahun 2018	"Selaras dengan komitmen kami melaporkan kinerja keberlanjutan PT TIMAH secara berkala, kami sampaikan Laporan Keberlanjutan PT TIMAH untuk periode tahun 2018 yang berisi berbagai inisiatif, program, dan aktivitas yang telah kami implementasikan sepanjang tahun. Berdasarkan arahan yang telah ditetapkan dalam strategi keberlanjutan PT TIMAH, Perseroan telah mengambil langkah-langkah guna memastikan keberlanjutan usaha, lingkungan, dan masyarakat" (PT Timah, 2018a: 44).	"Laporan Keberlanjutan Tahun 2018 (Laporan) Pertamina EP merupakan Laporan Keberlanjutan yang dikeluarkan untuk menggambarkan ki-nerja keberlanjutan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018" (PT Pertamina EP, 2018a: 35-36).	"Laporan ini disusun dengan mengadopsi dua pedoman pelaporan, yaitu GRI Standards dan Peraturan OJK 51/2017. Informasi yang tersaji pada laporan ini merupakan perpaduan kedua standar mengenai tata kelola dan kinerja Perseroan dalam konteks keberlanjutan" (PT Elnusa, 2018a: 20).

tuk de-instusionalisasi pola pelaporan yang lama dan memulai tahapan pre-institusionalisasi praktik pelaporan yang baru (Arroyo, 2012). PT Elnusa, contohnya, mengawali proses pre-institusionalisasi dengan menyajikan SR untuk mendampingi IR pada tahun 2017, yang kemudian melepaskan IR secara penuh pada tahun 2018 dengan menerbitkan AR dan SR. Proses transisi seperti ini terasa lebih mulus (*smooth*) dan membuat pemangku kepentingan lebih siap untuk menerima bahwa pada tahun berikutnya perusahaan akan menerapkan AR dan SR. Sementara itu, proses pre-institusionalisasi tidak terlihat secara jelas pada PT Timah dan PT Pertamina EP karena kedua perusahaan ini langsung menerapkan AR dan SR tanpa melewati proses pre-institusionalisasi dengan SR pada tahun 2017.

Celah terjadinya de-instusionalisasi IR pada ketiga perusahaan terletak pada '*gap*' antara IR yang diinginkan dalam IIRF dan GRI dengan praktik sebenarnya (Robertson & Samy, 2015; Stent & Dowler, 2015; Stubbs & Higgins, 2014). Berdasarkan laporan Liu et al. (2019) masih terdapat ketidaksesuaian antara pengungkapan korporat di Australia dan tolok ukur normatif yang terdapat dalam IIRF dan GRI G4. Ditinjau dari hasil kodifikasi *overview* organisasi dan lingkungan dalam IR dan SR PT Elnusa tahun 2017 yang berdasarkan kodifikasi elemen konten, terdapat penekanan khusus dalam laporan pada aspek keberlanjutan (lihat Tabel 5). Penekanan ini berupa pembahasan yang lebih detail berkenaan topik keberlanjutan tersaji dalam SR PT Elnusa, yang terpisah dari IR. Keteguhan perusahaan untuk tetap

menjaga keberlanjutan dalam SR berdasarkan GRI ditegaskan ulang oleh PT Elnusa dalam AR tahun 2018 dan didukung oleh pemisahan pengungkapan tentang aktivitas tanggung jawab sosial yang lebih detail terdapat pada laporan SR PT Elnusa dengan tujuan untuk memperkaya informasi serta pemahaman yang lebih mendalam bagi pemangku kepentingan. Berikut ini merupakan kutipan pernyataan dari PT Elnusa tentang komitmennya terhadap aspek keberlanjutan yang disampaikan dalam laporan IR tahun 2017 dan AR tahun 2018:

> "*Selamat datang di Laporan Tahunan Terintegrasi 2017 PT Elnusa Tbk* (selanjutnya dalam laporan ini disebut "Perseroan"). Laporan ini kami susun dengan mengikuti tiga pedoman, yaitu Peraturan OJK No.: 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, dan Pedoman Laporan Keberlanjutan GRI Standards. *Namun, untuk membahas lebih detail mengenai topik keberlanjutan, Perseroan menyajikannya secara terpisah dalam Laporan Keberlanjutan PT Elnusa*" (PT Elnusa, 2017b:7).

> "Selamat membaca *Laporan Tahunan* ("Laporan") *2018 PT Elnusa Tbk* ("Perseroan"). Laporan ini menyajikan informasi dengan fokus pada tata kelola perusahaan serta analisis kinerja operasional dan keuangan Perseroan pada tahun pelaporan. Penyajian informasi didasarkan atas Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 mengenai Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Informasi lain seperti tanggung jawab sosial perusahaan, kami sajikan secara ringkas pada laporan ini. Informasi lebih mendalam, kami sajikan dalam laporan keberlanjutan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik dan GRI *Standards.* Pemisahan laporan ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih kaya sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan" (PT Elnusa, 2018b:8).

Fenomena demikian menguatkan keraguan Flower (2015) yang mempertanyakan tentang alasan IIRC selaku pihak yang memprakarsai IR tidak terlalu menekankan aspek keberlanjutan. Seperti yang terlihat pada Tabel 5, hasil kodifikasi elemen konten, tepatnya kinerja menunjukkan bahwa pengungkapan IR tahun 2016 memperlihatkan perhatian ketiga perusahaan terhadap aspek keberlanjutan ini. Namun, pengungkapan ini terlihat tidak secara detail mengungkapkan kinerja keberlanjutan. Hal tersebut dapat dimaklumi bahwa untuk menyajikan IR, perusahaan perlu menyampaikan semua komponen wajib, sesuai pedoman IIRF atau GRI dalam satu laporan sehingga perusahaan tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyampaikan kinerja keberlanjutan secara komprehensif. Akan tetapi, bagi perusahaan, pengungkapan kinerja keberlanjutan merupakan media yang baik untuk meyakinkan pemangku kepentingan tentang pencapaian *triple bottom line.* Oleh karena itu, IR PT Elnusa tahun 2016 secara eksplisit menyebutkan laporan keberlanjutan tercakup dalam IR dan memuat kinerja perusahaan sehubungan dengan keberlanjutan. Bahkan, setelah melepas model pelaporan basis IR, PT Elnusa, dalam SR tahun 2018, menyebutkan bahwa informasi yang disampaikan dalam SR menganut perpaduan antara GRI dan POJK dalam konteks keberlanjutan. Kondisi ini tentu menambah keyakinan pengguna laporan keuangan bahwa perusahaan-perusahaan terus memperbaharui pola pelaporan korporatnya dalam memberikan ruang yang lebih luas untuk mengungkapkan aspek keberlanjutan tetapi mereka tetap menggunakan daftar *checklist* dari IR sebagai panduan pelaporannya. Singkatnya, perusahaan-perusahaan tetap mengambil 'ruh' dari IR yang melekat pada pola dan struktur pelaporan sebelumnya dalam rangka membangun SR yang lebih informatif dan komprehensif.

Keengganan ketiga perusahaan untuk tetap menerapkan IR menunjukkan pelaporan korporat berbasis IR tidak mampu

memuaskan kebutuhan informasi dari pemangku kepentingan mengenai aspek keberlanjutan. IR juga belum berfokus pada risiko keberlanjutan perusahaan (Dumay & Hossain, 2019) dan masih dipertanyakan konsekuensi ekonomi akibat penerapan IR (Barth et al., 2017). Meskipun IR disinyalir sebagai pola pelaporan yang berkualitas tinggi, perusahaan tidak mampu untuk mengeskpresikan semua cerita tentang aspek keberlanjutannya dalam IR dan informasi yang disajikan terkesan terpencar ke berbagai subjudul demi memenuhi rerangka konseptual IR. Maka, Dosinta et al. (2018) secara tegas menyampaikan bahwa pelaporan berbasis IR di Indonesia lebih tepat bersifat alternatif atau *voluntary* dan tidak ditetapkan sebagai *mandatory*. Praktik pelaporan korporat juga menunjukkan hal yang senada, yaitu PT Timah dan PT Elnusa mengambil sikap untuk menghentikan pelaporan IR pada tahun 2017 meskipun kedua perusahaan ini terdaftar di lantai Bursa Efek Indonesia. Selain alasan IR yang bersifat *voluntary*, kebermanfaatan pelaporan korporat sangat bergantung pada preferensi pengguna (Riduwan & Andayani, 2019) sehingga proses pertukaran informasi antara perusahaan dengan lingkungannya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Peralihan yang nyata atau perubahan semu? Dipandang dari perubahan struktur dan budaya pelaporan, struktur dan pola pelaporan yang telah terbentuk sewaktu adopsi IR tidak akan lenyap secara tiba-tiba pada saat perusahaan memutuskan untuk lepas dari IR. Hal-hal yang baik akan terekam dalam sistem perusahaan sedangkan yang kurang cocok dimodifikasi atau ditinggalkan. Untuk memastikan adanya perubahan semu dalam pelaporan korporat, sebagai tahap kedua penelitian, penelitian ini melakukan analisis terhadap cakupan pelaporan yang terdapat dalam AR dan SR yang selaras dengan IIRF dan GRI berdasarkan kodifikasi yang bersumber dari adaptasi KPMG (2014). Hasil kodifikasi, yang diringkas dalam Gambar 1 menunjukkan 'ruh' dari IR yang telah melekat pelaporan tahun sebelumnya tetap terbawa ke dalam AR dan SR dengan penekanan pada aspek keberlanjutan. Sebagai contoh, PT Pertamina EP, yang mengadopsi pedoman POJK, IIRF, dan GRI G4, masih tetap menggunakan pedoman-pedoman ini dalam menyajikan pengungkapannya saat beralih ke pelaporan AR dan SR. Begitu juga dengan PT Timah dan PT Elnusa, pengungkapan AR dan SR kedua perusahaan ini tetap berlandaskan pada acuan dari POJK dan GRI G4, seperti

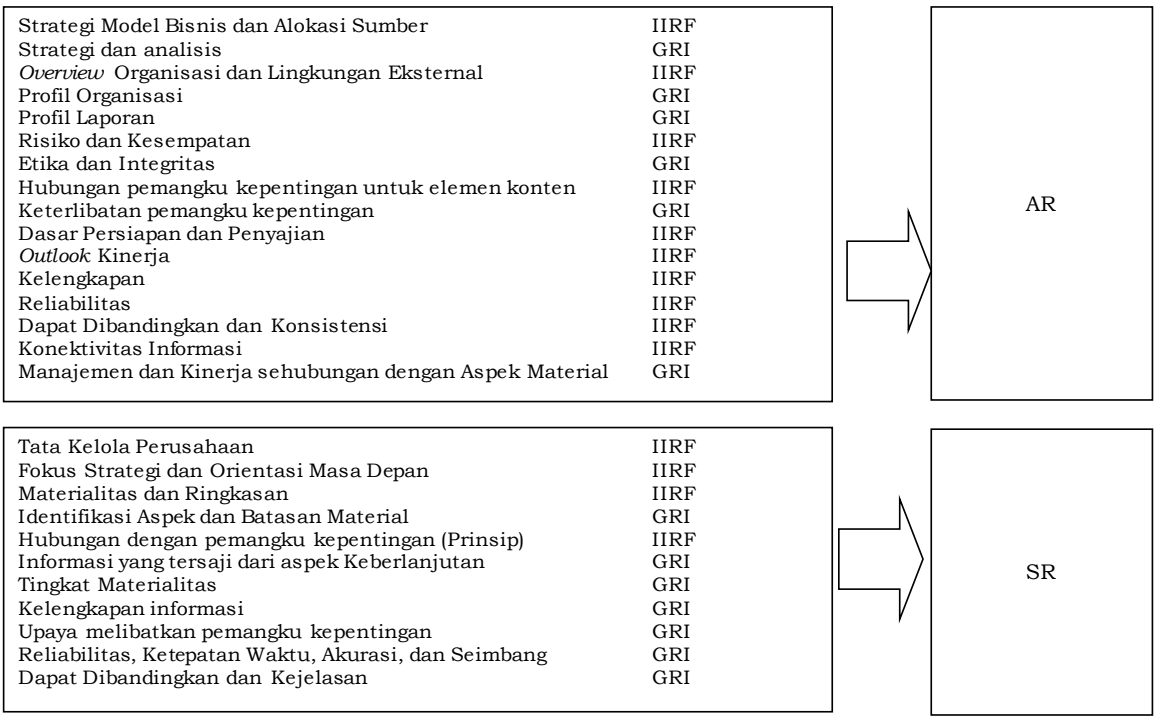

Gambar 1. Cakupan IIRF dan GRI dalam IR serta pada AR dan SR

Tabel 6. Pengungkapan Laporan Dewan Komisaris

	Diungkapkan pada bagian Laporan Dewan Komisaris		
	PT Timah	**PT Pertamina EP**	**PT Elnusa**
Diungkapkan pada awal pengadopsian IR	"*Pemegang Saham* yang terhormat, adalah merupakan suatu kehormatan bagi Dewan Komisaris untuk melaporkan capaian dan kinerja PT Timah (Persero) Tbk pada tahun 2010..." (PT Timah, 2010:15).	"*Pemegang saham* yang terhormat, secara umum, kinerja Perusahaan berjalan cukup Stabil di tahun 2012..." (PT Pertamina EP, 2012:35).	"Para *Pemegang Saham* yang terhormat, dengan mengucap syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, saya laporkan bahwa Perseroan berhasil melalui tahun 2016..." (PT Elnusa, 2014:20).
Diungkapkan dalam AR tahun 2018	"*Pemegang Saham* dan *Pemangku Kepentingan* yang Terhormat, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkah dan nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada kita semua sehingga PT TIMAH Tbk dapat melalui tahun 2018 yang penuh tantangan dengan pencapaian kinerja yang lebih baik..." (PT Timah, 2018b:52).	"*Pemangku Kepentingan* yang terhormat, Dewan Komisaris menyambut baik penerbitan Laporan Tahunan 2018 PT Pertamina EP..." (PT Pertamina EP, 2018b:25)	"*Pemegang Saham* dan *Pemangku Kepentingan* yang terhormat, Kami, Dewan Komisaris PT Elnusa Tbk melalui laporan ini dengan segala kerendahan hati memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sepanjang tahun 2018 Perseroan mencatat kinerja yang baik..." (PT Elnusa, 2018b:25)

pada saat perusahaan-perusahaan ini menerapkan IR. Namun, ruang pengungkapan untuk aspek keberlanjutan menjadi lebih luas karena perusahaan dapat menyajikan dua laporan yang terpisah, yaitu AR dan SR. Jadi, transisi demikian merupakan perubahan semu karena proses transisi pola pelaporan benar-benar terjadi tetapi esensi pelaporan masih tetap sama dengan peluasan pada ruang pengungkapan saja.

Hasil kodifikasi prinsip pedoman tepatnya menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan dari Liu et al. (2019) yang dirangkum dalam Tabel 6 juga menunjukkan perubahan fokus perhatian perusahaan, yang awalnya berfokus pada pemegang saham beralih ke pemangku kepentingan. Pada awal pengadopsian IR, cakupan pengungkapan Laporan Dewan Komisaris ditujukan kepada pemegang saham, sedangkan sejak tahun 2017 PT Timah, PT Pertamina EP, dan PT Elnusa memperluas penekanan hubungan perusahaan, yang sebelumnya hanya ditujukan kepada pemegang saham juga memperluas penekanan kepada pemangku kepentingan. Hal tersebut memperkuat argumen Flower (2015) dan Thomson (2015) tentang penekanan IR pada pemegang saham, bukan pada pemangku kepentingan. Namun, Tabel 6 juga mengindikasikan terjadinya perubahan semu pelaporan korporat. Secara jelas AR PT Timah dan PT Elnusa masih menaruh perhatian kepada pemegang saham dan memperluas cakupannya ke pemangku kepentingan sehingga kedua frase ini dipakai bersamaan. Ini berarti 'ruh' yang melekat pada awal pengadopsian IR dilanjutkan ke dalam AR dengan perluasan fokus komunikasi.

Pelajaran dari AR dan SR. Untuk dapat terus tumbuh, profitabilitas perusahaan harus dijaga dan ditingkatkan karena in merupakan tuntutan utama pemegang saham. Namun untuk mencapai pertumbuhan tersebut, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang memberikan nilai tambah bagi semua pihak tetap harus mendapatkan perhatian khusus (Riduwan & Andayani, 2018). Selain itu, sebagai *human constructs*, perusahaan harus menaruh perhatian khusus serta bertanggung jawab kepada masyarakat luas dan kepada pemangku kepentingan atas pengelolaan lingkungan (Heniwati & Asni, 2019), karena lingkungan berperan penting tidak hanya bagi organisasi tetapi juga berdampak bagi

Tabel 7. Prioritas Keberlanjutan dalam Laporan Keberlanjutan

Diungkapkan dalam SR pada bagian Tentang Laporan Ini		
PT Timah	**PT Pertamina EP**	**PT Elnusa**
"Pada tahun buku 2017 PT TIMAH Tbk kembali membuat Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) setelah periode sebelumnya pada tahun buku 2010 sampai dengan tahun buku 2016 Perseroan membuat laporan dalam bentuk Laporan Terintegrasi (*Integrated Report*). PT TIMAH Tbk berkomitmen untuk menjalankan bisnis dengan memperhatikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Komitmen ini disesuaikan pula dengan kepentingan para *pemangku kepentingan* yang telah diidentifikasi oleh Perusahaan sebelumnya. Melalui proses dan pendekatan khusus, diharapkan hubungan dan proses transfer informasi serta aspirasi antara kedua belah pihak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya" (PT Timah, 2017:14).	"PT Pertamina EP (selanjutnya dalam Laporan Keberlanjutan 2017 ini disebut "Pertamina EP", "Kami", Perusahaan", atau "Perseroan") mengusung tema "*Creating Sustainable Corporation, Maintaining Stakeholders' Trust*". Laporan ini merupakan laporan keberlanjutan pertama yang diterbitkan terpisah dari laporan tahunan di mana sebelumnya kami menerbitkan secara terintegrasi. Laporan ini menyajikan infomasi mengenai peran perusahaan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Laporan berkelanjutan ini adalah sarana transparansi atas pengungkapan kinerja keberlanjutan Pertamina EP, sekaligus alat komunikasi manajemen kepada para *pemangku kepentingan* untuk menunjukkan bahwa Pertamina EP telah mampu berpartisipasi dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan" (PT Pertamina EP, 2017:9).	"Selamat datang di Laporan Keberlanjutan 2017 PT Elnusa Tbk (selanjutnya dalam laporan ini disebut "Perseroan"). Laporan ini merupakan laporan pertama yang disusun dan akan disampaikan secara tahunan. Untuk membahas lebih detail mengenai topik keberlanjutan dan sebagai nilai tambah bagi para *pemangku kepentingan*, Perseroan menyajikannya secara terpisah. Laporan keberlanjutan ini mengacu pada dua pedoman yaitu dan Pedoman Laporan Keberlanjutan GRI *Standards* dan Peraturan OJK Nomor 51/ POJK.03/ 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik. Informasi yang tersaji pada laporan keberlanjutan ini meliputi tata kelola perusahaan dan laporan kinerja Perseroan dalam konteks keberlanjutan. Perseroan mengikuti dua pedoman dalam menyusun laporan tahunan keberlanjutan sesuai dengan standar informasi wajib yang harus disampaikan dalam masing-masing pedoman" (PT Elnusa, 2017a:19).

perusahaan. Oleh karena itu, mempertahankan Sumber Daya Alam (SDA) sudah selayaknya dilakukan mengingat perusahaan telah mendapatkan (*acquired*) *natural capital*, baik yang diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui (Dosinta et al, 2018). Perusahaan yang telah menjaga SDA dapat mengungkapkan melalui pelaporan korporat, di antaranya pada bagian *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara *mandatory* dalam AR atau mengungkapkan lebih detail mengenai topik keberlanjutan secara *voluntary* dalam SR.

Bagi perusahaan yang mendapatkan bahan baku dari alam atau memanfaatkan SDA, pengungkapan haruslah disajikan lebih banyak dibandingkan dengan pengungkapan dari industri lainnya. Hal ini dikarenakan bahan baku yang diambil dari bawah permukaan tanah dengan cara ekstraksi diklaim sebagai pemicu kerusakan SDA, sehingga perusahaan harus membuat SR agar pihak pemangku kepentingan tetap yakin dan percaya terhadap eksistensi perusahaan. Penelitian Rangkuti et al. (2019) menemukan bahwa perusahaan lebih berfokus pada laba daripada aspek keberlanjutan. Padahal, Sitorus (2015, 2016) menyatakan seharusnya perusahaan mempertimbangkan seberapa besar kontribusinya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan suatu aktivitas perekonomian. Kontribusi perusahaan kepada masyarakat untuk menjaga kelangsungan serta keberlanjutan SDA dapat diungkapkan pada SR. Dalam hal analisis industri, perusahaan industri sejenis memiliki praktik pengungkapan yang sebagian besar serupa (Villiers et al., 2014). Oleh karena itu, tidak mengherankan perusahaan-perusahaan yang bersinggungan dengan SDA cenderung menggunakan SR untuk mengungkapkan kontribusi kepada

masyarakat dalam kaitannya dengan suatu aktivitas perekonomian, serta keberlanjutan SDA untuk keberlangsungan perusahaan. Studi Rodríguez-Gutiérrez et al. (2019) menemukan bahwa kerangka kerja IIRC tidak memiliki potensi transformatif untuk menjadi *mandatory* pelaporan korporat. Hal Itu terjadi karena perusahaan memiliki pilihan untuk mengungkapkan keberlanjutan dalam SR. Di samping itu, SR telah dianggap sebagai alat untuk meningkatkan legitimasi dan reputasi dan dapat menunjukkan keterlibatan para pemangku kepentingan (Brusca et al., 2018). Hasil kodifikasi prinsip pedoman tepatnya menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan dari Liu et al. (2019) seperti yang disajikan pada Tabel 7, terlihat ketiga perusahaan menyajikan SR sebagai pengungkapan dalam konteks prioritas keberlanjutan serta menekankan pada pemangku kepentingan.

Memaknai karakteristik pelaporan korporat dari konsep institusional. Kehadiran sejumlah besar penyedia modal keuangan menyiratkan perlunya pengungkapan sukarela tentang kemampuan keberlanjutan untuk menghasilkan *value creation*. Manfaat yang dirasakan dari pengungkapan sukarela, mungkin bergantung pada kebutuhan yang dirasakan dalam memastikan legitimasi yang telah dilakukan, yang didorong oleh harapan para pemangku kepentingan, seperti kebutuhan untuk memastikan legitimasi yang telah dilakukan dalam sektor yang peka terhadap lingkungan, maka melalui pengungkapan pada kinerja lingkungan, para pemangku kepentingan memiliki minat yang kuat pada informasi tersebut. Hahn & Kühnen (2013) menegaskan jika suatu perusahaan perlu mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, pengungkapan sukarela dapat berfungsi. Penekanan aspek keberlanjutan yang termasuk di dalamnya *Environmental, Social and Governance* (ESG) diungkapkan dalam SR, salah satu bentuk pengungkapan sukarela di Indonesia (Dosinta et al., 2018). Pengungkapan sukarela selayaknya selaras dengan pengaturan dari institusi pada lingkungan operasional perusahaan.

Tekanan institusional merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengungkapan *voluntary* pada pelaporan korporat khususnya pada negara berkembang (Zaini et al., 2018). Tekanan institusional juga berperan dalam pengadopsian pelaporan bentuk baru yang dilakukan organisasi pada suatu perusahaan, seperti SR dan bentuk pelaporan lainnya. Teori institutional, yang beranggapan bahwa lingkungan kelembagaan dibentuk secara sosial (DiMaggio & Powell, 1983), telah muncul sebagai salah satu pendekatan konseptual yang digunakan dalam menganalisis dan memahami perubahan, dan dinamika antarperusahaan (Ilhan-Nas et al., 2015), yang telah digunakan untuk menjelaskan perubahan dalam praktik akuntansi dan untuk mengklarifikasi pengaruh praktik akuntansi pada perubahan kelembagaan dan organisasi (Rambaree, 2019).

Aggarwal & Jha (2019) mengemukakan bahwa *New Intitutional Theory* (NIT) berupaya tidak hanya menjelaskan variasi dan kesamaan dari organisasi-organisasi yang terlibat dalam hal struktur dan perilakunya, tetapi tidak setuju dengan perspektif yang mengklaim organisasi dalam perkembangannya hanyalah proses teknis guna memperbaiki efisiensi sebagai konsekuensi dari rasionalitas pihak-pihak yang menjalankan organsasi tersebut. Fokus NTI terletak pada tekanan eksternal yang diberikan pada suatu organisasi yang telah membentuknya dan berpengaruh serta berdampak pada struktur dan cara untuk mengaturnya (DiMaggio & Powell, 1983) serta untuk mendapatkan pandangan bagaimana perubahan pelaporan korporat berasal dari peran kelembagaan suatu perusahaan (Arroyo, 2012).

Kunci konsep dalam memahami teori institusional adalah *isomorphism* yang sebagian besar telah digunakan untuk menjelaskan homogenitas bentuk. *Isomorphism* merupakan proses adaptasi dari suatu organisasi terhadap lingkungan institusionalnya. Karena organisasi-organisasi yang menghadapi karakteristik lingkungan yang sama akan memiliki bentuk yang serupa, kesesuaian antara organisasi dengan lingkungannya akan menentukan legitimasi dan kelangsungan hidupnya (Aggarwal & Jha, 2019). Alasan untuk homogenitas ini adalah perubahan *isomorphism*, yang memiliki tiga bentuk utama, pertama *coercive isomorphism,* kedua *mimetic isomorphism,* serta ketiga *normatif isomorphism.* Pemahaman karakteristik, respon, proses, dan perubahan pelaporan korporat dari tiga bentuk *isomorphism* yang dikembangkan dari DiMaggio & Powell (1983) disajikan pada Tabel 8.

Konsep *isomorphism* berpotensi membantu membingkai pemahaman tentang mengapa perusahaan yang melakukan

Tabel 8. *Mapping* Karakteristik Pelaporan Korporat ke Konsep Institusional

	Mimetic Isomorfism	***Coercive Isomorfism***	***Normative Isomorfism***
Karakteristik	Tingginya tingkat ketidak pastian serta minimnya panduan dalam melakukan perubahan pelaporan kor porat	Kesamaan yang timbul dari pengaruh politik dan legitimasi	Perusahaan dengan spesifikasi industri tertentu akan cenderung mengadopsi praktik-praktik pelaporan korporat yang hampir sama
Respon	Pengkopian dengan perusahaan lain yang telah berhasil	Kesesuaian dengan tuntutan	Kesesuaian dengan ekspektasi
Proses	Identifikasi praktik yang terbaik	Tekanan dari pemangku kepentingan yang '*powerful*' sehingga perusahaan melakukan perubahan pelaporan korporat untuk memenuhi tekanan tersebut	Perusahaan menginternalisasi norma-norma yang berasal dari profesionalisasi dan standardisasi.
Perubahan pelaporan korporat	Untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, meningkatkan persepsi positif dari pemangku kepentingan serta legitimasi perusahaan	Untuk memenuhi keinginan pemangku kepentingan yang '*powerful*' serta meningkatkan legitimasi perusahaan	Untuk mengimplementasikan dan melembagakan

Sumber: DiMaggio & Powell (1983) dengan Modifikasi

pendekatan pelaporan dalam bentuk IR atau tidak lagi dalam bentuk IR (Adams et al., 2016). Harapan spesifik suatu perusahaan tidak terlepas dari harapan pemangku kepentingan yang diawali dengan pengungkapan sukarela melalui *mimetic isomorphism* yang memiliki elemen konformitas di mana organisasi mengadopsi praktik kontemporer untuk melegitimasi struktur, sistem, dan proses yang sepertinya tampak memegang kendali (Villiers & Alexander, 2014). Keputusan tentang adopsi, kuantitas dan kualitas pengungkapan sukarela akan menyelaraskan dalam seperangkat karakteristik isomorphism institusional (DiMaggio & Powell, 1983; Hahn & Kühnen, 2013).

Di Indonesia kemampuan beradaptasi atau melakukan isomorphism dari perusahaan-perusahaan terhadap lingkungannya akan menentukan kelangsungan hidupnya (Aggarwal & Jha, 2019). Proses *isomorphism* bisa terjadi pada pelaporan korporat yang *voluntary* diakibatkan adanya adaptasi serta perubahan dalam organisasi pada suatu perusahaan (Ilhan-Nas et al., 2015). Seperti terlihat pada Tabel 9, perusahaan melakukan *benchmark* terhadap perusahaan sejenis atau perusahaan lainnya yang memiliki kesamaan dalam mendapatkan bahan baku yang berasal dari *acquired* (*natural capital*), sehingga ketiga perusahaan melakukan perubahan penyusunan pelaporan korporat dari yang semula AR beralih ke IR kemudian beralih kembali ke AR dan SR. Dalam konteks visi perusahaan, PT Timah, PT Pertamina EP dan PT Elnusa memiliki visi berjaya di tingkat internasional (Dosinta et al., 2018). Pada saat pemangku kepentingan mengevaluasi untuk beralih ke IR, maka terjadi *mimetic isomorphism, coercive isomorphism,* dan *normative isomorphism.* Sementara itu, pada saat mengadopsi IR berdasarkan IIRF atau GRI G4, kemudian beralih ke AR berdasarkan POJK dan GRI G4 serta SR berdasarkan GRI G4 maka terjadinya *normative isomorphism.* Dengan demikian, perubahan pelaporan korporat ke AR dan SR melalui *mimetic isomorphism,* yang didukung hasil penelitian Rudyanto (2019) memaparkan bahwa *mimetic isomorphism* sebagai alasan dalam menyiapkan SR.

Tekanan dari pemangku kepentingan yang '*powerful*' (bagian dari *coercive isomorphism*) dihasilkan dari identifikasi praktik yang terbaik (bagian dari *mimetic isomorphism*), sehingga perusahaan melakukan perubahan pelaporan korporat untuk memenuhi tekanan tersebut serta menginternalisasi norma-norma yang berasal dari standardisasi (bagian dari *normative isomorphism*). Namun, seiring berjalannya waktu, untuk memenuhi keinginan serta tuntut-

Tabel 9. Perubahan Pelaporan Korporat dengan Konsep Institusional

Isomorphism	**Pra IR**	**Implementasi IR**	**Pasca IR**
Mimetic Isomorphism	√	√	√
Coercive Isomorphism	√	√	√
Normative Isomorphism	√	√	√

an pemangku kepentingan yang '*powerful*' (bagian dari *coercive isomorphism*), serta mendapatkan keunggulan kompetitif juga legitimasi (bagian dari *mimetic isomorphism*), perusahaan mengimplementasikan dan melembagakan perubahan pelaporan korporat yang tertuang dalam AR dan SR (bagian dari *normative isomorphism*). Dalam AR sebagai pemenuhan *mandatory* pelaporan perusahaan, sedangkan SR sebagai *voluntary* yang lebih detail dalam pelaporan informasi keberlanjutan. Oleh karena itu, perusahaan yang tidak lagi menyajikan IR dapat memprioritaskan keberlanjutan yang lebih detil pada satu pelaporan dalam SR sebagai wujud menjaga keberlangsungan perusahaan yang berkelanjutan di masa depan, sehingga menggiring publik untuk melegitimasi strategi yang sudah dilakukan perusahaan.

Dalam konteks teori legitimasi, pengungkapan dalam praktik IR serta pelaporan korporat dapat menggiring publik untuk legitimasi, strategi yang sudah dilakukan, serta dalam konteks teori *stakeholder,* terdapat pengkajian ulang sebelumnya melalui berbagai pertimbangan saran pemangku kepentingan secara kontinu atas pelaporan korporat. Namun, keeratan kedua teori tersebut juga dapat dijelaskan dari teori institusional. Kemampuan adaptasi atau sebagai *isomorphism* dari teori institusional berperan dalam melembagakan perubahan pelaporan korporat yang sebelumnya AR kemudian mengadopsi IR, dan selanjutnya memilih ke AR dan SR.

Pernyataan untuk memastikan legitimasi untuk bertindak (bagian dari teori legitimasi), kemudian terkait dengan karakteristik kelembagaan suatu negara tempat perusahaan beroperasional (bagian dari teori institusional) dan dapat dikelola secara proaktif melalui manajemen pemangku kepentingan (bagian dari teori *stakeholder*) (Baldini et al., 2018; Hahn & Kühnen, 2013) dapat dilihat dari upaya perusahaan yang mengungkapkan keberlanjutan sebagai prioritas yang diungkapkan dalam pelaporan korporat. Sebagai konsekuensinya, pelaporan korporat yang sebelumnya IR menunjukkan secara kontinu menghasilkan *value creation* serta keberlanjutan, terdapat unsur memastikan legitimasi untuk tindakan yang dilakukan perusahaan, yang menyiratkan pengungkapan kepada pemangku kepentingan, selanjutnya kemampuan adaptasi atau sebagai *isomorphism* dalam melembagakan perubahan pelaporan korporat untuk kelangsungan perusahaan. Dalam ekonomi politik terdapat kerangka sosial, politik, dan ekonomi yang berbaur dalam kehidupan masyarakat (Phiri et al., 2019) sebagaimana, karena masalah-masalah ekonomi tidak dapat diurai tanpa mempertimbangkan situasi politik dan sosial, sedangkan kerangka institusional berada dalam wilayah aktivitas perekonomian. Sebagaimana dipaparkan Calabrese et al. (2015), pelaporan korporat merupakan dokumen ekonomi, sosial, dan politik, yang oleh karena itu diperlukan sinopsis teori untuk menggambarkan keputusan pengungkapan dalam pelaporan korporat. Sinopsis teori didapatkan setelah mendapatkan simpulan teori dari data, melakukan analisis konten berdasarkan kodifikasi yang dilakukan secara berulang-ulang (Covaleski et al., 2013), sesuai yang disarankan oleh Elliot (2016) sebagaimana tahap ketiga dalam penelitian ini. Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini menunjukkan terjadi anomali pelaporan korporat di Indonesia yang bersifat semu dengan rerangka institusional. Konsep institusional tidak hanya dalam IR, yang diantaranya dipaparkan Adams et al. (2016), Chariri (2019), dan Fuhrmann (2019), tetapi juga dapat terjadi pada pelaporan korporat yang tidak disajikan dalam IR. Karakteristik perusahaan dapat menyebabkan perbedaan keputusan dalam pengungkapan pelaporan korporat. Hal tersebut dikarenakan perbedaan lingkungan institusional masing-masing perusahaan. Oleh karena itu, terjadinya perubahan pada pelaporan korporat yang *voluntary* dari proses *isomorphism* (Ilhan-Nas et al., 2015) dalam IR beralih menuju AR yang *mandatory* dan SR yang *voluntary*.

Politik penamaan dalam pelaporan korporat. Tulisan ini sependapat dengan Kamayanti (2017) dan Sitorus (2016) bahwa penerimaan perubahan menuju sesuatu yang dianggap lebih sesuai merupakan sesuatu yang normal, sedangkan mempertahankan kemapanan kuasa tertentu merupakan sesuatu yang tidak normal (abnormal). Walau perubahan pelaporan korporat bentuk IR menuju AR dan SR sepertinya sesuatu yang anomali, tulisan ini menunjukkan bahwa ketiga perusahaan memprioritaskan keberlanjutan.

Ketika kata-kata berbicara serta diungkapkan, pelaporan korporat layaknya permainan politik dengan sarat kepentingan. "*Politics of naming*" merupakan kalimat yang digunakan Irianto & Gaffikin (2006) dan Lauesen (2014) dimaknai sebagai simbolis dalam terjadinya perubahan pelaporan korporat yang merupakan dokumen sosial, politik, dan ekonomi. Terjadinya perubahan semu pelaporan korporat dapat dijelaskan tidak hanya melalui teori legitimasi dan teori *stakeholder,* tetapi juga teori institusional. Pada akhirnya, baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan selaku pihak yang menjadi bagian dari 'penguasa tertentu' pada perusahaan, selayaknya menginginkan untuk bertahan dalam kelangsungan perusahaan yang salah satu upayanya memprioritaskan keberlanjutan.

SIMPULAN

Keengganan perusahaan untuk tetap berada dalam bentuk IR menunjukkan pelaporan korporat di Indonesia cenderung tidak menginginkan IR bersifat *mandatory.* Solusinya, dalam rangka memandu pola pelaporan kembali ke AR dan SR, ketiga perusahaan masih menggunakan 'ruh' IR yang telah melekat pola pelaporan sebelumnya yang dapat dijelaskan oleh teori institusional. Ini berarti bahwa perubahan yang terjadi hanya berupa perubahan semu yang timbul karena politik penamaan. Walau ketiga perusahaan telah berhasil dalam menerapkan IR dengan kurun waktu 4-7 tahun, tidak menjamin bahwa pengadopsian IR dapat dilakukan secara kontinu. Terefleksi dari hasil penelitian ini, implikasi bagi pemangku kepentingan beserta pemegang saham selaku 'penguasa tertentu' dalam perusahaan adalah bahwa mereka selayaknya menekan pihak perusahaan untuk menjaga keberlangsungan perusahaan di masa depan, yang salah satu upayanya diwujudkan dengan memprioritaskan keberlanjutan. Karena '*true value*' yang bukan 'barang baru' bukanlah kata-kata yang tersusun diakibatkan oleh adanya permainan penguasa, melainkan suatu usulan dari IIRC agar *value creation* yang merupakan esensi IR menjadi lebih mudah dipahami.

Penelitian ini tidak dapat terlepas dari keterbatasan yang melekat pada penggunaan metodologi analisis konten yang merupakan metode analisis utama dalam penelitian ini. Selama ini peneliti analisis konten selalu mengantisipasi potensi kesalahan yang timbul akibat perbedaan keputusan dalam kodifikasi, konsistensi kategori hasil dan keakuratan analisis sehingga kedua peneliti berupaya untuk mengurangi keterbatasan ini lewat metode triangulasi dan berupaya untuk memastikan konsistensi hasil analisis yang lebih tinggi dengan melibatkan analis independen. Selain itu, ruang penafsiran penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan kodifikasi analisis konten yang dipilih oleh peneliti yang memungkinkan timbulnya kesalahan dan memperlebar subjektivitas. Mengingat keterbatasan penelitian ini, agenda penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan kategori dan kodifikasi yang dikembangkan oleh peneliti lainnya sebagai pembanding atau mengembangkan kodifikasi analisis konten yang baru dalam rangka membaca pengungkapan IR, AR, dan SR lebih akurat.

Perlu disampaikan pula bahwa penelitian ini tidak melakukan konfirmasi langsung ke pihak perusahaan studi kasus sehingga penafsiran yang diberikan murni berasal dari hasil penjaringan data pelaporan korporat. Maka, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mengagendakan hal ini. Dengan demikian, hal ini akan memperkaya pemahaman masyarakat mengenai proses transformasi pelaporan korporat yang sedang terjadi di Indonesia. Pada akhirnya penelitian mendatang disarankan untuk mempertimbangkan pelaporan korporat perusahaan yang mengalami anomali IR di luar sektor pertambangan dengan menggunakan metode dan cara penjaringan data yang berbeda serta mempertimbangkan faktor risiko keberlanjutan perusahaan dan konsekuensi ekonomi akibat penerapan IR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih ditujukan kepada *Editorial Team, Peer Reviewers,* dan *Management Team* serta analis independen yang telah

memberikan saran penyempurnaan pada manuskrip awal. Terima kasih juga disampaikan kepada FEB UNTAN yang telah mendukung pendanaan dalam penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

Adams, C. A. (2015). The International Integrated Reporting Council: A Call to Action. *Critical Perspectives on Accounting, 27,* 23–28. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.001

Adams, C. A., Potter, B., Singh, P. J., & York, J. (2016). Exploring the Implications of Integrated Reporting for Social Investment (Disclosures). *The British Accounting Review, 48*(3), 283–296. https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.05.002

Adhariani, D., & Villiers, C. D. (2019). Integrated Reporting: Perspectives of Corporate Report Preparers and Other Stakeholders. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 10*(1), 126–156. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-02-2018-0043

Aggarwal, V. S., & Jha, A. (2019). Pressures of CSR in India: An Institutional Perspective. *Journal of Strategy and Management, 12*(2), 227-242. https://doi.org/10.1108/JSMA-10-2018-0110

Anney, V. N. (2014). Ensuring the Quality of the Findings of Qualitative Research: Looking at Trustworthiness Criteria. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies, 5*(2), 272–281. https://doi.org/10.3109/08941939.2012.723954

Arroyo, P. (2012). Management Accounting Change and Sustainability: An Institutional Approach. *Journal of Accounting and Organizational Change, 8*(3), 286–309. https://doi.org/10.1108/18325911211258317

Baldini, M., Maso, L. D., Liberatore, G., Mazzi, F., & Terzani, S. (2018). Role of Country- and Firm-Level Determinants in Environmental, Social, and Governance Disclosure. *Journal of Business Ethics, 150*(1), 79–98. https://doi.org/10.1007/s10551-016-3139-1

Bananuka, J., Tumwebaze, Z., & Orobia, L. (2019). The Adoption of Integrated Reporting: A Developing Country Perspective. *Journal of Financial Reporting and Accounting, 17*(1), 2–23. https://doi.org/10.1108/JFRA-09-2017-0089

Barter, N. (2016). A Review of "A New Vision of Value" – Old Wine, New Bottle. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 7*(4), 531–538. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2015-0111

Barth, M. E., Cahan, S. F., Chen, L., & Venter, E. R. (2017). The Economic Consequences Associated with Integrated Report Quality: Capital market and Real Effects. *Accounting, Organizations and Society, 62*, 43–64. https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.08.005

Beck, C., Dumay, J., & Frost, G. (2015). In Pursuit of a 'Single Source of Truth': From Threatened Legitimacy to Integrated Reporting. *Journal of Business Ethics, 141*(1), 191–205. https://doi.org/10.1007/s10551-014-2423-1

Bommel, K. V. (2014). Towards a Legitimate Compromise?: An Exploration of Integrated Reporting in the Netherlands. *Accounting, Auditing and Accountability Journal, 27*(7), 1157–1189. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2013-1309

Brusca, I., Labrador, M., & Larran, M. (2018). The Challenge of Sustainability and Integrated Reporting at Universities: A Case Study. *Journal of Cleaner Production, 188,* 347–354. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.03.292

Calabrese, A., Costa, R., & Rosati, F. (2015). A Feedback-Based Model for CSR Assessment and Materiality Analysis. *Accounting Forum, 39*(4), 312-327. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2015.06.002

Chariri, A. (2019). The Patterns of Integrated Reporting: A Comparative Study of Companies Listed on the Johannesburg Stock Exchanges and Indonesia Stock Exchanges. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 9*(1), 1–11. https://doi.org/10.22219/jrak.v9i1.39

Conway, E. (2019). Quantitative Impacts of Mandatory Integrated Reporting. *Journal of Financial Reporting and Accounting, 17*(4), 604–634. https://doi.org/10.1108/JFRA-08-2018-0066

Cortesi, A., & Vena, L. (2019). Disclosure Quality under Integrated Reporting: A Value Relevance Approach. *Journal of Cleaner Production, 220*, 745–755. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.02.155

Coulson, A. B. (2016). KPMG's True Value Methodology: A Critique of Economic

Reasoning on The Value Companies Create and Reduce for Society. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 7*(4), 517–530. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-05-2016-0027

Covaleski, M., Dirsmith, M., & Samuel, S. (2013). The Social Construction and Transformation of a Budgetary Regime: The Endogenization of Welfare Regulation by Institutional Entrepreneurs. *Journal of Management Accounting Research, 38*(5), 333–364.

Davis, N., & Bisman, J. E. (2015). Annual Reporting by an Australian Government Department: A Critical Longitudinal Study of Accounting and Organisational Change. *Critical Perspectives on Accounting, 27,* 129–143. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.02.001

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociological Association, 48*(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101

Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2*(1), 147–185. https://doi.org/10.18202/jamal.2011.04.7115

Dosinta, N. F., Brata, H., & Heniwati, E. (2018). Haruskah Value Creation Hanya Terdapat pada Integrated Reporting? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9*(2), 248–266. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9015

Dumay, J., Bernardi, C., Guthrie, J., & Torre, M. L. (2017). Barriers to Implementing the International Integrated Reporting Framework: A Contemporary Academic Perspective. *Meditari Accountancy Research, 25*(4), 461–480. https://doi.org/10.1108/MEDAR-05-2017-0150

Dumay, J., & Dai, T. (2017). Integrated Thinking as a Cultural Control? *Meditari Accountancy Research, 25*(4), 574–604. https://doi.org/10.1108/MEDAR-07-2016-0067

Dumay, J., & Hossain, M. A. (2019). Sustainability Risk Disclosure Practices of Listed Companies in Australia. *Australian Accounting Review, 29*(2), 343–359. https://doi.org/10.1111/auar.12240

Efferin, S. (2015). Akuntansi, Spritualitas dan Kearifan Lokal: Beberapa Agenda Penelitian Kritis. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6*(3), 466–480. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6037

Elliot, V. H. (2016). Institutional Entrepreneurship and Change; A Contemporary History of the Swedish Banking Industry and Its Performance Management Systems. *Journal of Accounting and Organizational Change, 12*(2), 223–251. https://doi.org/10.1108/JAOC-06-2013-0059

Feng, T., Cummings, L., & Tweedie, D. (2017). Exploring Integrated Thinking in Integrated Reporting – An Exploratory Study in Australia. *Journal of Intellectual Capital, 18*(2), 330–353. https://doi.org/10.1108/JIC-06-2016-0068

Flower, J. (2015). The International Integrated Reporting Council : A Story of Failure. *Critical Perspectives on Accounting, 27,* 1–17. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.002

Fuhrmann, S. (2019). A Multi-Theoretical Approach on Drivers of Integrated Reporting – Uniting Firm-Level and Country-Level Associations. *Meditari Accountancy Research, 28*(1), 168–205. https://doi.org/10.1108/MEDAR-12-2018-0412

Hahn, R., & Kühnen, M. (2013). Determinants of Sustainability Reporting: A Review of Results, Trends, Theory, and Opportunities in an Expanding Field of Research. *Journal of Cleaner Production, 59*, 5–21. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005

Haji, A. A., & Anifowose, M. (2016). The Trend of Integrated Reporting Practice in South Africa: Ceremonial or Substantive? *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 7*(2), 190–224. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-11-2015-0106

Haji, A. A., & Anifowose, M. (2017). Initial Trends in Corporate Disclosures Following the Introduction of Integrated Reporting Practice in South Africa. *Journal of Intellectual Capital, 18*(2), 373–399. https://doi.org/10.1108/JIC-01-2016-0020

Heniwati, E., & Asni, N. (2019). Intrinsic Value dari Pelaporan Keanekaragaman Hayati. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10*(2), 207–226. https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10012

Higgins, C., Stubbs, W., Tweedie, D., & McCallum, G. (2019). Journey or Toolbox?

Integrated Reporting and Processes of Organisational Change. *Accounting, Auditing and Accountability Journal, 32*(6), 1662–1689. https://doi.org/10.1108/AAAJ-10-2018-3696

Ilhan-Nas, T., Koparan, E., & Okan, T. (2015). The Effects of the CSR Isomorphism on Both CSP and CFP. *Journal of Asia Business Studies, 9*(3), 251-272. https://doi.org/10.1108/JABS-11-2014-0086

Irianto, G., & Gaffikin, M. (2006). [When] the Words are "Played." *Critical Perspectives on Accounting, 17*(5), 679–680. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2004.11.003

Kamayanti, A. (2017). Akuntan(Si) Pitung: Mendobrak Mitos Abnormalitas dan Rasialisme Praktik Akuntansi. *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 2*(3), 171–180. https://doi.org/10.18382/jraam.v2i3.176

Kannenberg, L., & Schreck, P. (2019). Integrated Reporting: Boon or Bane? A Review of Empirical Research on Its Determinants and Implications. *Journal of Business Economics, 89*, 515–567. https://doi.org/10.1007/s11573-018-0922-8

Karlsson, M., & Sjøvaag, H. (2016). Content Analysis and Online News. *Digital Journalism, 4*(1), 177-192. https://doi.org/10.1080/21670811.2015.1096619

KPMG. (2014). *Bridging the Gap between Integrated Reporting and GRI G4 Reporting.* https://home.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2014/10/bridging-the-gap-between-integrated-and-gri-g4-reporting.pdf

Lauesen, L. M. (2014). How Well are Water Companies Engaged in CSR? A Critical Cross-Geographical Discourse Analysis. *Social Responsibility Journal, 10*(1), 115-136. https://doi.org/10.1108/SRJ-11-2011-0099

Liao, P. C., Xia, N. N., Wu, C. L., Zhang, X. L., & Yeh, J. L. (2017). Communicating the Corporate Social Responsibility (CSR) of International Contractors: Content Analysis of CSR Reporting. *Journal of Cleaner Production, 156,* 327-336. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.04.027

Liu, Z., Jubb, C., & Abhayawansa, S. (2019). Analysing and Evaluating Integrated Reporting: Insights from Applying a Normative Benchmark. *Journal of Intellectual Capital, 20*(2), 235–263. https://doi.org/10.1108/JIC-02-2018-0031

Macias, H. A., & Farfan-Lievano, A. (2017). Integrated Reporting as a Strategy for Firm Growth: Multiple Case Study in Colombia. *Meditari Accountancy Research, 25*(4), 605–628. https://doi.org/10.1108/MEDAR-11-2016-0099

Massingham, R., Massingham, P. R., & Dumay, J. (2019). Improving Integrated Reporting: A New Learning and Growth Perspective for the Balanced Scorecard. *Journal of Intellectual Capital, 20*(1), 60–82. https://doi.org/10.1108/JIC-06-2018-0095

Menicucci, E. (2018). Exploring Forward-Looking Information in Integrated Reporting: A Multidimensional Analysis. *Journal of Applied Accounting Research, 19*(1), 102–121. https://doi.org/10.1108/JAAR-01-2016-0007

Modell, S. (2015). Making Institutional Accounting Research Critical: Dead end or New Beginning? *Accounting, Auditing and Accountability Journal, 28*(5), 773–808. https://doi.org/10.1108/AAAJ-09-2013-1457

Modell, S. (2017). Critical Realist Accounting Research: In Search of Its Emancipatory Potential. *Critical Perspectives on Accounting, 42*, 20–35. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2016.03.001

Mulawarman, A. D. (2010). Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 1*(1), 155-171. https://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7086

Owen, G. (2013). Integrated Reporting: A Review of Developments and their Implications for the Accounting Curriculum. *Accounting Education, 22*(4), 340-356. https://doi.prg/10.1080/09639284.2013.817798

Phiri, O., Mantzari, E., & Gleadle, P. (2019). Stakeholder Interactions and Corporate Social Responsibility (CSR) Prac-

tices: Evidence from the Zambian Copper Mining Sector. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, 32*(1), 26-54. https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2016-2540

PT Elnusa. (2014). *Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2014*. https://www.elnusa.co.id/idn/investor/investor-information/ar/

PT Elnusa. (2016). *Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2016.* https://www.elnusa.co.id/idn/investor/investor-information/ar/

PT Elnusa. (2017a). *Laporan Keberlanjutan Tahun 2017.* https://www.elnusa.co.id/wp-content/uploads/2011/12/SR-Elnusa-2017.pdf

PT Elnusa. (2017b). *Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2017*. https://www.elnusa.co.id/idn/investor/investor-information/ar/

PT Elnusa. (2018a). *Laporan Keberlanjutan Tahun 2018.* https://www.elnusa.co.id/wp-content/uploads/2011/12/SR-Elnusa-2018.pdf

PT Elnusa. (2018b). *Laporan Tahunan Tahun 2018.* https://www.elnusa.co.id/idn/investor/investor-information/ar/

PT Pertamina EP. (2012). *Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2012*. https://pep.pertamina.com/Annual.aspx

PT Pertamina EP. (2016). *Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2016.* https://pep.pertamina.com/Annual.aspx

PT Pertamina EP. (2017). *Laporan Keberlanjutan Tahun 2017.* https://pep.pertamina.com/Laporan_Keberlanjutan

PT Pertamina EP. (2018a). *Laporan Keberlanjutan Tahun 2018.* https://pep.pertamina.com/Laporan_Keberlanjutan

PT Pertamina EP. (2018b). *Laporan Tahunan Tahun 2018.* https://pep.pertamina.com/Annual.aspx

PT Timah. (2010). *Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2010*. http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/

PT Timah. (2016). *Laporan Tahunan Terintegrasi Tahun 2016*. http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/

PT Timah. (2017). *Laporan Keberlanjutan Tahun 2017.* http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-keberlanjutan/

PT Timah. (2018a). *Laporan Keberlanjutan Tahun 2018.* http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-keberlanjutan/

PT Timah. (2018b). *Laporan Tahunan Tahun 2018.* http://www.timah.com/v3/ina/laporan-laporan-tahunan/

Rambaree, B. B. (2019). Content in the Context of Welfare Configurations: A Comparative Institutional Analysis of Self-Reporting on Corporate Social Responsibility. *Social Responsibility Journal, 16*(4), 487-506. https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2017-0121

Rangkuti, H. A., Yuliantoro, H., & Yefni. (2019). Lebih Penting Mana Sustainability Report atau Laba bagi Perusahaan Perkebunan? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10*(2), 365–378. https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10021

Reverte, C. (2015). The Integrated Reporting Movement: Meaning, Momentum, Motives and Materiality. *Journal of Cleaner Production, 86,* 285–288. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.08.073

Riduwan, A., & Andayani, A. (2018). Peran Akuntansi dalam Pertanggungjawaban Sosio-Ekologi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 9*(2), 205–222. https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9012

Riduwan, A., & Andayani, A. (2019). Prinsip "Jancukan" dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 10*(2), 379–398. https://doi.org/10.18202/jamal.2019.08.10022

Robertson, F. A., & Samy, M. (2015). Factors Affecting the Diffusion of Integrated Reporting – A UK FTSE 100 Perspective. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 6*(2), 190–223. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2014-0044

Rodríguez-Gutiérrez, P., Correa, C., & Larrinaga, C. (2019). Is Integrated Reporting Transformative? An Exploratory Study of Non-Financial Reporting Archetypes. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 10*(3), 617–644. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-12-2017-0156

Rudyanto, A. (2019). Mimetic Isomorphism as a Reason for Preparing Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Multiparadig-*

ma, 10(3). https://doi.org/10.18202/jamal.2019.12.10025

Setia, N., Abhayawansa, S., Joshi, M., & Huynh, A. V. (2015). Integrated Reporting in South Africa: Some Initial Evidence. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 6*(3), 397–424. https://doi.org/10.1108/SAMPJ-03-2014-0018

Setiawan, A. R. (2011). Tinjauan Paradigma Penelitian: Merayakan Keragaman Pengembangan Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 2*(3), 402–417. https://doi.org/10.18202/jamal.2011.12.7128

Sitorus, J. H. E. (2015). Membawa Pan casila dalam Suatu Definisi Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6*(2), 254–271. https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6021

Sitorus, J. H. E. (2016). Pancasila-Based Social Responsibility Accounting. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219*, 700–709. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.054

Slack, R. & Tsalavoutas, I. (2018). Integrated Reporting Decision Usefulness: Mainstream Equity Market Views. *Accounting Forum, 42*(2), 184-198. https://doi.org/10.1016/j.accfor.2018.01.005

Sriwenarti, N. K., & Triyuwono, I. (2010). Pemilihan Paradigma Penelitian Akuntansi: Analisis Berdasarkan Pewarigaan dan Kecerdasan Manusia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 1*(2), 172–190. https://doi.org/10.18202/jamal.2010.08.7087

Steenkamp, N. (2018). Top Ten South African Companies ' Disclosure of Materiality Determination Process and Material Issues in Integrated Reports. *Journal of Intellectual Capital, 19*(2), 230–247. https://doi.org/10.1108/JIC-01-2017-0002

Stent, W., & Dowler, T. (2015). Early Assessments of the Gap between Integrated Reporting and Current Corporate Reporting. *Meditari Accountancy Research, 23*(1), 92–117. https://doi.org/10.1108/MEDAR-02-2014-0026

Steyn, M. (2014). Organisational Benefits and Implementation Challenges of Mandatory Integrated Reporting: Perspectives of Senior Executives at South African Listed Companies. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, 5*(4), 476–503. https://doi.org/10.1108/sampj-11-2013-0052

Stubbs, W., & Higgins, C. (2014). Integrated Reporting and Internal Mechanisms of Change. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27*(7), 1068–1089. https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1279

Sudarma, M. (2010). Paradigma Penelitian Akuntansi dan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 1*(1), 97–108. https://doi.org/10.18202/jamal.2010.04.7082

Thomson, I. (2015). "But Does Sustainability Need Capitalism or An Integrated Report" A Commentary on "The International Integrated Reporting Council: A story of Failure" by Flower, J. *Critical Perspectives on Accounting, 27*, 18–22. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.003

Tlili, M., Ben Othman, H., & Hussainey, K. (2019). Does Integrated Reporting Enhance the Value Relevance of Organizational Capital? Evidence from the South African Context. *Journal of Intellectual Capital, 20*(5), 642–661. https://doi.org/10.1108/JIC-02-2019-0034

Trilling, D., & Jonkman, J. G. F. (2018). Scaling up Content Analysis. *Communication Methods and Measures, 12*(2-3), 158-174. https://doi.org/10.1080/19312458.2018.1447655

Veltri, S., & Silvestri, A. (2015). The Free State University Integrated Reporting: A Critical Consideration. *Journal of Intellectual Capital, 16*(2), 443–462. https://doi.org/10.1108/JIC-06-2014-0077

Villiers, C. D., & Alexander, D. (2014). The Institutionalisation of Corporate Social Responsibility Reporting. *British Accounting Review, 46*(2), 198–212. https://doi.org/10.1016/j.bar.2014.03.001

Villiers, C. D., Rinaldi, L., & Unerman, J. (2014). Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal, 27*(7), 1042–1067. https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2014-1736

Witono, B. (2016). Bahasa Akuntansi sebagai "Discourse-Driven" dalam Budaya Kapitalisme Baru. *Riset Akuntansi*

dan Keuangan Indonesia, 1(2), 89-97. https://doi.org/10.23917/reaksi.v1i2.2733

Wulf, I., Niemöller, J., & Rentzsch, N. (2014). Development Toward Integrated Reporting, and Its Impact on Corporate Governance: A Two-Dimensional Approach to Accounting with Reference to The German Two-tier System. *Journal of Management Control, 25*(2), 135–164. https://doi.org/10.1007/s00187-014-0200-z

Zaini, S. M., Samkin, G., Sharma, U., & Davey, H. (2018). Voluntary Disclosure in Emerging Countries: A Literature Review. *Journal of Accounting in Emerging Economies, 8*(1), 29–65. https://doi.org/10.1108/JAEE-08-2016-0069